

DIFUSI INOVASI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kokom Komalasari

Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154
email: komsari36@yahoo.co.id

Abstract: Diffusing Innovation in Contextual Teaching-Learning of Civic Education. This study aimed to describe the implementation, constraints and resistance, and also factors that should be considered in diffusing contextual teaching-learning innovation. The study employed both quantitative and qualitative approaches. The population of this research was students of Junior High Schools in West Java with a sample consisting of 1004 students, and 16 civic education teachers who participated in Competence-based Integrated Training. The results show that the implementation of contextual teaching-learning in West Java fell into the category of average. Cooperation was the most frequently applied, while direct experience and authentic assessment were the least. There were constraints and resistance in implementing contextual teaching-learning related to teachers' competence, school climate, and cultural change. Therefore, factors of teachers, students, facilities, expenses, curriculum, school climate, parents and society should be taken into account.

Abstrak: Difusi Inovasi Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan, kendala, resistensi, serta faktor yang harus diperhatikan dalam difusi inovasi pembelajaran kontekstual. Proses penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan pola "*the dominant-less dominant design*" dari Creswell. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei dan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara. Populasi penelitian adalah siswa SMP se-Jawa Barat dengan sampel 1.004 siswa dan 16 guru Pendidikan Kewarganegaraan yang telah mengikuti pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran kontekstual di Jawa Barat termasuk kategori sedang/cukup. Kerjasama paling tinggi penerapannya, pengalaman langsung dan asesmen otentik paling rendah penerapannya. Terdapat kendala dan resistensi dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual yang terkait kemampuan guru, iklim sekolah, serta perubahan budaya. Oleh karena itu harus diperhatikan faktor guru, siswa, fasilitas, biaya, kurikulum, iklim sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Kata Kunci: pembelajaran kontekstual, pendidikan kewarganegaraan, inovasi pendidikan

Pembelajaran merupakan inti dari pendidikan. Pemecahan masalah rendahnya kualitas pendidikan harus difokuskan pada kualitas pembelajaran. Pendidik adalah salah peran kunci dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Pendidik yang baik adalah pendidik yang kreatif, selalu mencari pendekatan atau strategi baru dalam pembelajaran. Pencarian pendekatan atau strategi baru menimbulkan berbagai macam inovasi pembelajaran. Wujud, bentuk, dan upaya inovasi ini bermacam-macam. Namun demikian, semuanya memiliki tujuan umum yang sama, yaitu terwujudnya proses pembelajaran berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan suatu program pendidikan pada jenjang, jenis, maupun jalur manapun. Salah satu wujud inovasi pembelajaran adalah penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching*

and Learning). Pendekatan ini menjadi tuntutan pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004) yang diteruskan dalam kurikulum 2006. Departemen Pendidikan Nasional telah melaksanakan Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) untuk guru-guru SMP di Jawa Barat pada tahun 2004 dengan harapan guru menerapkan pembelajaran kontekstual di sekolah. Pembelajaran CTL dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pelaksanaan difusi inovasi pembelajaran kontekstual ini masih menghadapi berbagai kendala dan resistensi, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan, kendala, resistensi, serta faktor yang harus diperhatikan dalam difusi inovasi pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan pola “*the dominant-less dominant design*” dari Creswell (1994:177). Bagian pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni melalui metode survei. Langkah berikutnya penelitian ini menggunakan paradigma tambahan (kurang dominan) dengan pendekatan kualitatif untuk pendalaman. Pada tahap ini ditambahkan teknik wawancara.

Populasi penelitian ini adalah siswa SMPN kelas IX di Jawa Barat yang diajar oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan yang telah mengikuti Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) pada tahun 2004, yang terdiri atas 93 SMPN yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *cluster sampling*, *proportional*, dan *systematic random sampling*, sehingga diperoleh 1.004 sampel siswa SMP di Jawa Barat.

Pengumpulan data menggunakan angket terhadap siswa. Di samping itu, digunakan pula wawancara terhadap 16 guru pendidikan kewarganegaraan. Analisis data kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara penentuan kelompok berdasarkan perbandingan nilai skor responden dengan nilai ideal. Analisis data hasil wawancara menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif dan uji kecenderungan terhadap data persepsi siswa tentang kondisi pembelajaran kontekstual dapat diketahui bahwa sebagian besar (87,22%) kondisi pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan di SMP Jawa Barat termasuk kategori sedang/cukup, sebagian (11,67%) termasuk kategori tinggi, dan hanya sebagian kecil saja (1,11%) yang termasuk kategori rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi siswa sebagian besar SMP di Jawa Barat cukup baik kondisinya dalam penerapan pendekatan kontekstual pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Variabel pembelajaran kontekstual dalam penelitian ini terdiri dari enam sub variabel, yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menerapkan konsep keterkaitan (X1), konsep pengalaman langsung (X2), konsep aplikasi (X3), konsep kerjasama (X4), konsep pengaturan diri (X5), dan konsep asesmen otentik (X6). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara variabel pembelajaran kontekstual, konsep kerjasama yang paling tinggi (929,48%) diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, disusul dengan

konsep pengaturan diri (20,02%), keterkaitan (14,08%), dan aplikasi (12,08). Konsep yang masih dianggap kurang diterapkan adalah konsep pengalaman langsung dan asesmen otentik.

Hasil wawancara dengan guru pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa Pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu inovasi pembelajaran dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. (1) Sarana dan prasarana, media dan alat pembelajaran di sekolah masih kurang memadai dan sumber belajar di luar sekolah tidak terjangkau. (2) Keterbatasan akses terhadap sumber informasi (surat kabar, media elektronik). (3) Budaya belajar mandiri dan gemar membaca masih rendah. (4) Keterbatasan waktu dan biaya. (5) Dukungan moral dan material manajemen sekolah, orang tua, masyarakat, dan instansi terkait masih kurang. (6) Kedalaman materi kurang tercapai, karena materi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum cukup sulit dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan berpikir siswa SMP. (7) Penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan rumit, terutama berkaitan dengan disposisi dan keterampilan kewarganegaraan. (8) Pendidikan dan pelatihan kemampuan metodologi pembelajaran bagi guru masih kurang dan tidak merata.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab inovasi pembelajaran kontekstual sering ditolak oleh para pelaksana inovasi di sekolah adalah sebagai berikut. (1) Sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi pembelajaran kontekstual tersebut sehingga inovasi tersebut dianggap bukan miliknya, dan tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah mereka. (2) guru ingin mempertahankan sistem pembelajaran konvensional/tradisional yang mereka lakukan saat ini karena sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap memberikan rasa aman atau kepuasan serta sudah baik sesuai dengan pikiran mereka. (3) Inovasi yang dibuat oleh orang lain terutama dari pusat (khususnya Depdiknas) belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi guru, siswa, dan sekolah. (4) Inovasi yang diperkenalkan dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek yang segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa terhenti kalau proyek itu selesai atau kalau finansial sudah tidak ada. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk mengubahnya. (e) Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai, menyeluruh, dan tersistem tentang pembelajaran kontekstual

sehingga masih banyak guru yang belum mengetahui, memahami, apalagi menerima, dan menerapkan pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran. Sementara itu, guru yang sudah mengikuti pelatihan pembelajaran kontekstual pun sulit menyosialisasikan kepada rekan guru lainnya.

Guru telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kendala tersebut, di antaranya (1) melakukan kegiatan terpadu antarmata pelajaran; (2) meningkatkan motivasi belajar mandiri dan motif beprestasi siswa melalui kompetisi dalam pencapaian nilai dan pemberian *reward*; (3) mengoptimalkan sarana dan prasarana, media dan alat pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar; (4) swadaya biaya dari siswa dan guru; (5) melakukan kerjasama dengan instansi terkait; (6) memotivasi orang tua untuk mendukung keberhasilan belajar anak melalui rapat orang tua, *home visit*; dan komite sekolah; (7) mengoptimalkan peran MGMP sebagai *peer group* untuk berbagi informasi perkembangan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan; (8) melibatkan seluruh pihak dalam inovasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa.

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara (Blanchard, 2001: 2; Berns, 2001:4). Dengan demikian, pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna (Johnson, 2002:24).

Karakteristik pembelajaran kontekstual menurut Blanchard (2001:5) meliputi (1) bersandar pada memori mengenai ruang, (2) mengintegrasikan berbagai subjek materi/disiplin, (3) nilai informasi didasarkan pada kebutuhan siswa, (4) menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal siswa, dan (5) penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata. Secara lebih lengkap, Johnson (2002:24) mengidentifikasi delapan komponen yaitu (a) membuat hubungan penuh makna; b) melakukan pekerjaan penting; (c) belajar mengatur sendiri; (d) kerjasama; (e) berpikir kritis dan kreatif; (f) memelihara individu; (g) mencapai standar tinggi; dan (h) penggunaan penilaian sebenarnya. Sementara itu, Sounders (1999) memfokuskan pembelajaran pada REACT. (*Relating*: belajar dalam konteks pengalaman hidup. *Experiencing*: belajar dalam konteks pencarian dan penemuan. *Applying*: belajar ketika pengetahuan diperkenalkan dalam konteks penggunaannya. *Cooperating*: belajar

melalui konteks komunikasi interpersonal dan saling berbagi. *Transferring*: belajar menggunakan pengetahuan dalam suatu konteks atau situasi baru. Pembelajaran kontekstual dalam penelitian ini meliputi enam karakteristik, yaitu keterkaitan, pengalaman langsung, penerapan, kerjasama, pengaturan sendiri, dan penilaian otentik.

Pembelajaran kontekstual merupakan suatu inovasi belajar. Agar inovasi ini diadopsi guru di sekolah perlu proses difusi inovasi, yakni proses pengomunikasikan inovasi melalui suatu saluran tertentu dalam suatu rentang waktu dalam suatu sistem sosial sekolah. Sifat pembelajaran kontekstual itu sendiri sebagai suatu inovasi pembelajaran: (1) pembelajaran kontekstual mendatangkan keuntungan *relative* bagi guru dalam upaya meningkatkan profesionalismenya dan kepentingan siswa (*relative advantage*); (2) pembelajaran kontekstual sesuai bagi guru, baik dilihat dari sisi pengetahuan dan pengalaman, maupun dari sisi tata nilai serta budayanya; (3) pembelajaran kontekstual tidak terlalu kompleks bagi guru, bila terlalu kompleks sampai sulit dipahami, maka inovasi itu akan lambat diadopsi (*complexity*); (4) pembelajaran kontekstual dapat dicoba oleh guru. Pembelajaran kontekstual harus dapat dicoba oleh guru sampai berhasil dengan baik atau memuaskan; (5) hasil pembelajaran pembelajaran kontekstual dapat diamati/dilihat oleh orang lain. Untuk menyebarkan pembelajaran kontekstual sebagai suatu inovasi pembelajaran kepada guru, diperlukan suatu saluran komunikasi, baik melalui saluran interpersonal berupa seminar, pendidikan dan pelatihan, obrolan antarguru dalam MGMP, obrolan antarguru di sekolah (kontak-kontak personal), maupun melalui media massa. Termasuk di dalamnya adalah pembagian buku pembelajaran kontekstual yang telah diterbitkan Depdiknas. Di antara kedua saluran tersebut, yang banyak dilakukan dalam inovasi pembelajaran kontekstual adalah melalui saluran interpersonal dengan terjadinya kontak-kontak personal di antara guru dengan pendidik/pelatih pembelajaran kontekstual, diantara guru di sekolah, antara guru dengan kepala sekolah. Kecepatan waktu pengadopsian. Tidak semua guru memiliki kecepatan yang sama dalam mengadopsi pembelajaran kontekstual, ada guru termasuk pengikut dini, pengikut akhir, dan paling akhir mengadopsi (kolot). Guru yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan pembelajaran kontekstual tahap pertama cenderung menjadi pengikut dini pembelajaran kontekstual, selanjutnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selanjutnya menjadi pengikut akhir, dan guru yang belum mengikuti pelatihan dan tidak mau belajar pada guru yang sudah menerima pendidikan dan pelatihan cenderung memper-

tahankan metode pembelajaran konvensional dan ini berarti sangat sulit menerima inovasi pembelajaran kontekstual. Sistem sosial dalam pengadopsian pembelajaran kontekstual lebih ditekankan pada sistem sosial sekolah, yaitu suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anggota sistem sosial sekolah adalah kepala sekolah, guru, siswa, tata usaha, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Di antara anggota sistem sosial sekolah ada yang memegang peranan penting dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut *pemuka pendapat* dan *agen pembaharu*. Di dalam sistem sosial sekolah, pemuka pendapat biasanya kepala sekolah dan beberapa guru yang dianggap memiliki wawasan luas dan kemampuan lebih maju dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan guru lain sehingga menjadi tempat guru lain untuk bertanya dan meminta nasihat tentang suatu perkara. Agen pembaharu dalam sistem sosial sekolah adalah orang yang aktif berusaha menyebarkan inovasi pembelajaran kontekstual ke sekolah, yaitu tenaga profesional yang mewakili Depdiknas yang berusaha mengadakan pembaruan proses pembelajaran, di antaranya para instruktur pendidikan dan pelatihan pembelajaran kontekstual. Agen pembaharu ini akan berhasil jika gencar melakukan usaha promosi, lebih memperhatikan kebutuhan sekolah dan guru, bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru lain yang dianggap pemuka pendapat, dan dapat dipercaya oleh sekolah dan guru.

Di antara keenam karakteristik pembelajaran kontekstual, *experiencing* dan asesmen otentik sebagai jantung pembelajaran kontekstual. Penerapannya masih kurang dan sangat banyak kendala serta resistensi. Penerapan konsep pengalaman langsung sebagai jantung pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, investigasi, dan penelitian. Kegiatan eksplorasi, penemuan, investigasi, dan penelitian merupakan kegiatan pembelajaran yang baru dan merupakan bagian dari suatu inovasi pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar terhadap pembelajaran konvensional, dan merubah tatanan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru tradisional yang berbentuk *grand covering technique*. Perubahan mendasar terjadi ketika guru menghadapi kendala dan resistensi terutama sesuatu yang sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan pembelajaran yang dilakukannya selama ini. Umumnya, guru menganggap bahwa inovasi pembelajaran akan membawa konsekuensi pada dirinya untuk mengubah budaya mengajar dan menyesuaikan dengan ke-

harusan meningkatkan kualifikasi dalam pembelajaran yang baru. Hal ini bukan suatu yang mudah dilakukan. Belum lagi menghadapi kurangnya dukungan dari sistem budaya sekitarnya yang menyangkut guru, sekolah, masyarakat, pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah, biaya, sarana dan prasarana, waktu, dan kurikulum dalam pelaksanaan *experiencing*.

Penilaian otentik mampu mengungkap hasil belajar siswa dari aspek pengetahuan sikap dan proses atau kinerja siswa secara aktual. Walaupun dalam penerapannya masih terbatas dalam prosedur dan alat penilaiannya. Sebagian besar guru mengetahui jenis-jenis penilaian kelas yang antara lain meliputi jenis penilaian kinerja (*performance assessment*), penilaian karya (*product assessment*), penilaian penugasan, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Guru pendidikan kewarganegaraan menyadari bahwa semua penilaian tersebut menyiratkan makna bahwa penilaian mencakup hal-hal yang lebih luas dari sekedar penilaian konvensional yang selama ini berlangsung. Akan tetapi, mereka kesulitan membuat alat penilaiannya. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan profesionalisme guru dalam melakukan penilaian otentik. Asesmen otentik itu amat penting, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan para guru merasa kesulitan dalam melaksanakan, karena belum memahami prosedur penggunaannya. Hal ini terkait kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang penerapan penilaian otentik bagi guru. Penelitian Medrich (2004:1-5) mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor penghambat implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, sebagai berikut. (1) Resistensi dari generasi tua, termasuk guru yang melanjutkan kepercayaan dan praktek budaya dan sub budaya politik otoriter dalam pembelajaran. (2) Perubahan yang lambat dalam kelembagaan di sekolah, tidak hanya ketika ada perubahan isi, tetapi juga ketika metoda pembelajaran baru diperkenalkan. Pendidikan kewarganegaraan memerlukan metode pembelajaran yang memperhatikan isi materi dan sekaligus metodologi. Sering fokus kepada materi dan mengabaikan metodologi, atau sebaliknya aktivitas yang menyenangkan, tetapi sedikit materi yang dipelajari. (3) Tidak berfungsinya desentralisasi pengambilan keputusan untuk mengembangkan desain pembelajaran dan implementasi program kurikulum. (4) Resistensi terhadap gaya mengajar yang demokratis dan pemberdayaan siswa. Metode interaktif, diskusi, debat, simulasi demokratis, tidak dapat dipungkiri lebih ribut dan berpotensi lebih mengganggu dibandingkan dengan metode tradisional. Guru hendaknya memiliki kemampuan mengatur konflik dan debat tersebut. (5) Kurangnya pelatihan bagi guru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kelas pendidikan kewargane-

garaan sebagai laboratorium demokrasi. Selain itu juga tidak tersedia sumber daya untuk melatih guru dalam hal tersebut. (6) Berhadapan dengan keanekaragaman dan kesenjangan; jurang antara ide atau harapan dan kenyataan. Permasalahan muncul pada bagaimana guru berhadapan dengan keanekaragaman siswa dan membantu siswa belajar menghadapi secara produktif kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada di dalam sistem politik negaranya.

Jika memperhatikan berbagai kendala dan resistensi inovasi pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut di atas, maka semuanya bermuara pada masalah perubahan budaya. Hal ini terkait dengan masalah sulitnya mengubah budaya otoriter guru dalam mengajar pendidikan kewarganegaraan yang bernuansa indoktrinasi rezim penguasa selama enam dasa warsa menuju budaya demokrasi yang dihembuskan reformasi saat ini. Selama ini pendidikan kewarganegaraan sangat sarat dengan muatan politis dari rezim penguasa, (Kalidjernih, 2008:127-128). Lebih lanjut Kalidjernih (2008:140) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia zaman Orde Baru (1966-1998) dikritik karena tidak atau kurang merefleksikan cita sipil yang demokratis. Pemahaman cita sipil bersifat “top down” sesuai dengan kepentingan rezim penguasa diajarkan kepada siswa dengan metode dan teknik yang tidak partisipatoris tetapi cenderung merupakan kegiatan menghafal.

Kenyataan ini diperkuat dengan sikap mental akibat kolonialisasi yang menghambat kemajuan. Sikap mental ini diantaranya meremehkan mutu, suka menarabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin murni, dan tidak bertanggung jawab yang kokoh. Sikap mental ini boleh jadi ikut menyumbang pelbagai ekses yang meluas di kalangan guru selama ini, sehingga menghambat implementasi inovasi pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Mengubah sikap mental sebagai budaya *immaterial* yang sudah tertanam sekian lamanya merupakan suatu hal yang sulit dan membutuhkan proses panjang. Perubahan budaya immaterial senantiasa lebih lambat dibandingkan dengan budaya material. Pembelajaran kontekstual yang membawa nuansa perubahan budaya immaterial, yaitu orientasi nilai pembelajaran demokratis membutuhkan proses panjang untuk dapat diadopsi oleh guru. Kesenjangan pertumbuhan yang tidak sama cepatnya ini menimbulkan ketidakseimbangan yang sering disebut *cultural lag* dan menimbulkan *cultural shock* pada guru yang menjadi subjek perubahan budaya. Dengan demikian, dalam difusi inovasi pembelajaran kontekstual, perubahan sikap mental organisasi sistem sosial (guru, siswa, kepala sekolah, dan

sivitas sekolah lainnya, dan masyarakat) sebagai subjek perubahan menjadi salah satu fokus utama dan pertama.

Untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pembelajaran melalui pembelajaran kontekstual. Pertama, guru memiliki peran yang amat penting bagi proses pendidikan. Demikian pentingnya sampai John Goodlad, ketua Asosiasi Kepala Sekolah di Amerika Serikat suatu saat berujar, “manakala guru sudah masuk ke ruang kelas dan menutup pintu kelas itu, dialah yang akan menentukan apakah proses belajar itu berjalan dengan baik atau tidak, dapat mencapai tujuan atau tidak” (Suyanto, 2004).

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain penguasaan materi yang diajarkan, metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antarindividu, baik dengan siswa maupun antarsesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan, dan pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Dengan demikian, dalam pembaharuan pembelajaran melalui pembelajaran kontekstual, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Hal ini, karena mereka menganggap inovasi yang tidak melibatkan mereka adalah bukan miliknya yang harus dilaksanakan, tetapi sebaliknya mereka menganggap akan mengganggu ketenangan dan kelancaran tugas mereka. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pembelajaran melalui pembelajaran kontekstual, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai dokter, dan sebagai motivator.

Sebagai subjek utama dalam pendidikan terutama dalam proses pembelajaran, siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pembelajaran, walaupun hanya dengan

mengenalkan kepada mereka tujuan dari perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Peran siswa dalam inovasi pembelajaran kontekstual tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa dapat berperan sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pembelajaran dalam bentuk pembelajaran kontekstual sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi.

Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Fasilitas mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, pelaksanaan inovasi pembelajaran hampir dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan proses pembelajaran. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pembelajaran, di antaranya pembelajaran kontekstual, fasilitas perlu diperhatikan.

Penerapan inovasi pembelajaran berbentuk pembelajaran kontekstual secara tidak langsung membawa dampak positif maupun negatif. Orang tua dan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Karena yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan orang tua dan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan.

Biaya sering dirasakan membebani guru dan siswa. Berbagai media, sumber, tugas yang dikerjakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan biaya akan menghambat pelaksanaan inovasi pembelajaran kontekstual.

Iklim sekolah hendaknya kondusif bagi pelaksanaan inovasi pembelajaran. Keberhasilan inovasi pembelajaran kontekstual didukung oleh sekolah yang efektif, yang mempunyai lima ciri penting: (1) kepemimpinan yang kuat; (2) penekanan pada pencapaian kemampuan dasar; (3) adanya lingkungan yang nyaman; (4)

harapan yang tinggi pada prestasi siswa; (5) dan penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keberhasilan penerapan pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan perlu melibatkan berbagai pihak. Sekolah dan masyarakat dapat dilibatkan dalam beberapa hal. Kesadaran bahwa sumber belajar tidak hanya berasal dari buku dan guru, melainkan juga dari lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di masyarakat. Strategi pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki banyak variasi sehingga memungkinkan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang berbeda dengan keajegan yang ada. Pihak sekolah dan masyarakat perlu memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil untuk menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Hal ini sejalan dengan hasil studi *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Tahap I* (Hahn dan Torney-Purta, 1999) yang menunjukkan bahwa "Citizenship education" atau "civic education" seyogyanya dikembangkan bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua, dan masyarakat, termasuk pemerintah. Hal tersebut pada dasarnya secara konseptual mencerminkan konsep "thick citizenship education" yang merujuk pada kontinum "education for citizenship" (Kerr 1999:16).

SIMPULAN

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan di Jawa Barat menurut persepsi siswa masuk kategori sedang/cukup. Di antara enam karakteristik pembelajaran kontekstual, pengalaman langsung (*experiencing*) dan asesmen otentik paling rendah penerapannya. Terdapat beberapa kendala pelaksanaan pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan, kepemimpinan kepala sekolah yang kurang mendukung; sarana dan prasarana pembelajaran tidak memadai; kualitas guru masih rendah dan tidak merata; kondisi siswa kurang mendukung; biaya dan dana tidak memadai; keterbatasan waktu; dukungan orang tua, masyarakat, dan instansi sebagai sumber belajar; kejelasan kurikulum dan tingkat kesulitan materi dalam kurikulum. Terdapat resistensi terhadap pembelajaran kontekstual yang bersifat demokratis dan memberdayakan siswa dari beberapa guru yang melanjutkan praktik budaya dan subbudaya politik otoriter dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam difusi inovasi pembelajaran kontekstual perlu diperhatikan faktor-faktor guru, siswa, fasilitas, biaya, iklim sekolah, dukungan orang tua dan masyarakat, kurikulum, dan perubahan budaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Berns, R. G. & Erickson, P. M. 2001. *Contextual Teaching and Learning The Highlight Zone: Reserach @ Work No. 5*. (Online). (<http://www.nccte.org/publications/infosynthesis/highlightzone/highlight05/index.asp>, diakses 26 Mei 2004).
- Blanchard, A. 2001. *Contextual Teaching and Learning*. (Online). (<http://www.horizonshelpr.org/contextual/contextual.htm> - 8k, diakses 17 Maret 2003).
- Creswell, J. W., 1994 *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Hahn, C.L. & Torney-Purta, J. 1999. "The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives". *Social Education*, 63,(7):425-431.
- Johnson, E. B. 2002. *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It Is Here to Stay*. California USA: Corwin Press. Inc.
- Kalidjernih, F.K. 2008. Cita Sipil Indonesia Pascakolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru. *Jurnal Acta Civicus* 1 (2):127-146.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*, London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Medrich, E., 2004. *Essentials of High School Reform, New Forms of Assessment and Context-tual teaching and Learning* (Online). (<http://www.aypf.org/Publications/EssentialsofhighschoolReform.Fdf>, diakses 4 Agustus 2003)
- Sounders. 1999. *Contextually Based Learning: Fad or Proven Practice*, (Online) (<http://www.uga.edu/fb070999.htm>, diakses 16 Juni 2003).
- Suyanto, 2006. *Penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Posing) dalam upaya Meningkatkan Aktivitas Bertanya Siswa*. (Online). (<http://pkab.wordpress.com/2008/04/30/pengembangan-model-belajar-interaktif-berbasis-komputer>, diakses 29 April 2008).